

MAKNA FRAUD BAGI PENGELOLA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO (SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI)

Eko Triyanto¹, Zulfikar², Triono³

^{1,2,3} Program Studi Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹Email: triyantoeko376@gmail.com

²Email: zulfikar@ums.ac.id

³Email: tri280@ums.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna *fraud* bagi pengelola Badan Keswadayaan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini ialah penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma interpretif metode fenomenologi. *Fraud* yang terjadi pada BKM dimaknai sebagai sebuah keterpaksaan dan sebuah karakter. *Fraud* terjadi sebagai sebuah keterpaksaan karena desakan ekonomi dan kondisi tidak ada jalan lain selain harus melakukan penyelewengan. Sedangkan *fraud* sebagai sebuah karakter yaitu bahwa tindakan *fraud* terjadi bukan karena kesempatan, *fraud* terjadi karena sebab utama karakter buruk pada oknum. Pada tempat dan kondisi apapun kesempatan akan selalu diciptakan untuk melakukan penyelewengan, sehingga sangat sulit untuk di sembuhkan atau dibrantas karena telah mandarah daging membentuk sebuah karakter dan budaya, dimana penyelewengan itu terjadi berulang dan tertata sehingga muncul kiasan “asal main cantik”.

Kata Kunci: *Fraud*, Fenomenologi, Badan Keswadayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Salah satu agenda perjuangan reformasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah penghapusan praktek-praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Korupsi menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi nampaknya hanya tindakan sia-sia. Tindakan korupsi telah menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia (Rizka, 2017).

Korupsi adalah salah satu bentuk kecurangan atau *fraud* terhadap keuangan organisasi. Menurut (Albrecht, 2012) menjelaskan bahwa data statistik tentang berapa banyak penipuan (*fraud*) yang terjadi sulit untuk di dapatkan. Namun, semua tanda menunjukkan bahwa kecurangan semakin meningkat baik frekuensi maupun jumlahnya. Penipuan sangat merugikan organisasi dan ekonomi. Karena penipuan mengurangi laba bersih pada laporan keuangan, jumlah tambahan pendapatan yang dibutuhkan untuk mengembalikan dana yang dicuri adalah lebih banyak dari jumlah penipuan yang terjadi. Persoalan penipuan atau kecurangan keuangan seperti tindakan korupsi tidak hanya melanda keuangan dan organisasi dunia namun juga ditanah air.

Menurut ACFE Indonesia (2019) *fraud* menjadi sebuah pekerjaan berat yang harus diselesaikan hingga saat ini. Hampir tidak ada institusi/lembaga yang benar-benar terbebas dari ancaman *fraud*. Para pelaku *fraud* dating dari semua lapisan baik itu golongan atas maupun pegawai golongan rendah. Oleh sebab itu perlu kepedulian dari berbagai pihak untuk sadar, waspada dan peduli terhadap potensi *fraud* pada lingkungan kerjanya. Tidak terkecuali di Indonesia, tindakan *fraud* juga merajalela bahkan mandarah-daging terlebih tindakan korupsi.

Menurut Setiadi (2020) bahwa persoalan korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang sangat rumit. Wabah korupsi sudah menjangkit hampir semua lini kehidupan. Sikap galak dan keras aparat penegak hukum nampaknya tidak cukup kuat untuk menahan laju korupsi. Penyakit korupsi seolah-olah telah menjadi budaya,

selain itu keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi, menambah panjang persoalan bagi aparat.

Tidak hanya kalangan pejabat eselon 1, Pegawai BUMN atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi. Baru-baru ini kita disuguhkan dengan berita korupsi yang dilakukan oleh oknum masyarakat pada dana bantuan program PNPM. Seperti yang dilansir oleh baliexpress.jawapos.com pada 5 November 2019 bahwa Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Karangasem menetapkan Ketua PNPM Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada kasus tindak pidana korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Rendang, Karangasem. Ketua PNPM Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menyalahgunakan kedudukannya sebagai ketua dengan meloloskan 32 kelompok fiktif penerima manfaat dana perguliran. Hal serupa juga terjadi, dugaan korupsi dana PNPM pada Unit Pengelolaan Keuangan di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sempulur Desa Tempel Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, terjadi sejak September 2010.

Dari dua kejadian diatas memperlihatkan bahwa masih banyak kasus *fraud* baik berupa penyimpangan ataupun manipulasi, terlepas apakah penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian materiil ataupun tidak. Beberapa penyimpangan pada BKM adalah fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam, bagaimana pengelola dan lingkungan memaknai penyimpangan. Karena menurut Manossoh (2016) pelaku *fraud* biasanya dilakukan oknum pimpinan dan pegawai yang bekerjasama, diantaranya ada yang tugas fungsinya mengoperasikan sistem operasi dan menjalankan sistem pengendalian intern. Sedangkan pada BKM, sebagian besar pengurus nya adalah para sukarelawan dari masyarakat desa yang memiliki keterbatasan pengetahuan, rata-rata berkemampuan ekonomi sedang kebawah.

Objek penelitian pada BKM menjadi menarik diangkat karena BKM adalah badan independen yang di tunjuk dan di pilih secara bersama oleh masyarakat atas dasar musyawarah. BKM dijalankan oleh beberapa orang dari wakil masyarakat dengan satu komando pimpinan kolektif yang disebut Koordinator BKM. BKM bertanggungjawab langsung kepada Rapat Warga Tahunan dan Koordinator KOTAKU. Badan ini dalam laporan pertanggungjawabannya wajib untuk mengauditkan diri kepada Auditor Independent. Hal ini menjadi menarik karena ternyata kasus *fraud* masih saja muncul pada Badan Keswadayaan Masyarakat, yang notabennya adalah organisasi sosial tingkat desa dengan kepemimpinan sukarelawan.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul penelitian” **Makna Fraud Bagi Pengelola Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Studi Fenomenologi)**”

TEORI

Teori Agency

Secara implisit teori keagenan dapat dipandang sebagai satu versi dari *Game Theory* yang membuat model proses kontrak antara dua orang atau lebih. Scott (1997:233) dalam (Siallagan, 2016) menyatakan bahwa perusahaan memiliki banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kedua jenis kontrak ini sering kali dibuat berdasarkan angka laba bersih. Oleh sebab itu, teori keagenan dapat mempunyai implikasi terhadap akuntansi.

Upaya agen sebagai salah satu pihak dalam kontrak tidak dapat dilihat oleh principalnya, tetapi hasilnya yang dapat diketahui oleh banyak pihak. Supaya hasil kinerja dapat digunakan sebagai dasar kontrak, maka visualisasi laporan harus dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Implikasinya dalam konteks akuntansi bahwa apakah angka laba bersih dimengerti oleh semua pihak terutama pihak *principle* atau tidak (Siallagan, 2016). Dari sinilah muncul peran dan hubungan antara *principal* dan *agensi*.

Fraud

Albrecht 2012 dalam bukunya menjelaskan bahwa fraud adalah penipuan dalam istilah umum, dan mencakup semua cara yang beragam yang dapat dirancang oleh kecerdikan manusia, yang ditempuh oleh satu individu atau lebih, untuk mendapatkan keuntungan atas yang lain dengan representasi palsu. Tidak ada ketentuan yang pasti dan dapat ditetapkan berubah-ubah sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan penipuan, karena termasuk:

gratifikasi, tipu daya, cara licik dan ketidak adilan. Satu-satunya batasan yang mendefinisikan *fraud* adalah mereka yang membatasi kecurangan manusia itu sendiri.

G. L. Vousinas, (2019) menjelaskan bahwa *fraud* adalah tindakan kecurangan yang akan selalu terjadi dan mampu menembus celah-celah pengendalian internal perusahaan walaupun dibuat berlapis-lapis. *Fraud* adalah masalah internasional yang dapat terjadi di organisasi mana saja setiap saat, sementara tindakan *fraud* saat ini meningkat terutama didorong oleh krisis keuangan global dan resesi ekonomi yang akan datang.

Bentuk Fraud

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) mengklasifikasikan *fraud* menjadi tiga jenis berdasarkan perbuatannya, yaitu :

1. *Asset Misappropriation*. *Fraud* jenis ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan atau negara. Karena sifat objeknya yang *tangible*, nyata dapat dilihat dan diukur (*defined value*) sehingga bentuk *fraud* ini paling mudah dideteksi.
2. *Fraudulent Statements*. *Fraud* yang dilakukan oleh pejabat perusahaan atau instansi pemerintah untuk mengkamufleskan kondisi keuangan yang sebenarnya. Pada *fraud* jenis ini biasanya dengan melakukan rekayasa keuangan seperti menutupi keburukan dan menyajikan berlebihan.
3. *Corruption*. Korupsi adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya termasuk didalamnya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan (*economic extortion*). *Fraud* ini banyak terjadi di negara berkembang yang notabene penegakan hukumnya lemah dan kurang kesadaran akan tata kelola yang baik. *Fraud* jenis ini sulit dideteksi karena dilakukan secara bersama (*simbiosis mutualisme*) menikmati keuntungan bersama.

Skala Fraud

Albrecht dkk. (1984) dalam (G. L. Vousinas, 2019) memperkenalkan skala penipuan dalam "Mencegah Penipuan: Internal" Perspektif Auditor” (*Institute of Internal Auditors Research Foundation*) menjadi alat untuk menilai tindakan *fraud* melalui evaluasi kekuatan tekanan, kesempatan dan integritas pribadi. Albrecht percaya bahwa penipuan sulit diprediksi karena para pelaku *fraud* bertindak profesional. Mereka menyarankan bahwa kemungkinan tindakan penipuan bisa dinilai dengan mengevaluasi kekuatan dari tekanan, kesempatan, dan integritas pribadi. Tekanan dan peluang keduanya merupakan komponen dari segitiga penipuan, tetapi skala penipuan menggantikan integritas pribadi untuk rasionalisasi. Skala penipuan terutama berlaku untuk penipuan laporan keuangan, di mana sumber tekanan (misalnya, analisis forecast, panduan manajemen pendapatan dan histori penjualan dan pertumbuhan pendapatan) lebih dapat diamati. Dengan mengingat hal itu, skala penipuan menyatakan bahwa ketika tekanan, kesempatan dan integritas dipertimbangkan pada saat yang sama, maka akan dapat menentukan apakah suatu situasi memiliki resiko *fraud* lebih tinggi atau tidak.

Perkembangan Teori Fraud

1. The Fraud Triangle

Menurut (Albrecht, 2012) menjelaskan bahwa meskipun ada ribuan cara untuk melakukan penipuan, Contoh kasus Dennis Greer yang melakukan *kiting* antar bank , namun Albrecht menggambarkan tiga elemen kunci yang umum dapat menggambarkan mengapa seseorang melakukan penipuan. Tiga factor tersebut meliputi: (1) tekanan, (2) peluang, dan (3) beberapa cara untuk merasionalisasi penipuan. Ketiga elemen ini membentuk konsep segitiga penipuan (*fraud Triangle*).

2. Fraud Diamond

Teori *Fraud Diamond* muncul dari pengembangan teori *Fraud Triangle*, Wolfe dan Hermanson (2004) memasukkan unsur kapabilitas ke dalam Model Cressey, mengubahnya dari segitiga menjadi berlian dalam artikel mereka yang berjudul “The *Fraud Diamond*: Mempertimbangkan Empat Elemen *Fraud*”. Selain itu orang yang sering melakukan penipuan memiliki ego yang kuat dan keyakinan besar bahwa dia tidak akan terdeteksi, atau orang tersebut percaya bahwa dia dapat dengan mudah membela diri jika tertangkap.

Teori Fraud Diamond menambahkan faktor capability karena beberapa alasan diatas. Kemampuan mengendalikan emosi, mengendalikan situasi, dan kemampuan mengendalikan kondisi atas pengetahuan dan pengalamannya membuat kecurangan berlangsung lama dan mengalami kerugian yang semakin besar.

3. Fraud Pentagon

Penipuan tidak akan pernah berhenti terjadi, bahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin menjadi peluang dengan beragam kasus penipuan dalam jumlah kasus yang banyak. Teori *fraud* perlu perkembangan untuk menyesuaikan hal tersebut.

Beberapa teori dikembangkan diantaranya adalah teori *Fraud* Pentagon yang di cetuskan oleh Vousinas, (2019). Dalam tulisannya Vousinas (2019) menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pemahaman di balik faktor utama yang mengarah pada komitmen penipuan, penulis membangun latar belakang teori dan memperkenalkan S.C.O.R.E. model. Model ini adalah nama pendek dari kata: *stimulus, capability, opportunity, rationalization* dan *Ego*. Empat elemen model ini berasal dari *Fraud Diamond*, sedangkan yang kelima diperkenalkan untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan penipuan serta memperluas pemahaman kita tentang faktor penentu utama dari kegiatan penipuan.

4. Fraud Hexagon

Tindakan *fraud* besar dalam beberapa dekade terakhir, termasuk Enron, WorldCom dan Parmalat, semua membenarkan dan sepakat bahwa kolusi menjadi elemen kunci pada semua kejadian tersebut. Memang, sulit untuk mengidentifikasi terhadap *fraud* organisasi yang tidak melibatkan banyak orang (G. Vousinas, 2018).

Upaya untuk mencegah *fraud* atau penipuan salah satunya adalah diberlakukannya sistem pemisahan tugas dan independensi. Tetapi ketika beberapa pelaku *fraud* bekerja sama, mereka dengan mudah dapat merusak system tersebut. Jadi S.C.O.R.E. model menjadi S.C.C.O.R.E. model, dengan tambahan keenam unsur kolusi, sehingga menghasilkan *Fraud* Hexagon, seperti terlihat di bawah ini.

Harus ditekankan fakta bahwa S.C.C.O.R.E. model harus digunakan sebagai ekstensi untuk nilai. Model S.C.C.O.R.E. sangat relevan dijadikan pemahaman dasar pada *fraud* yang terjadi saat ini, di mana kolusi memainkan peran penting pada setiap kasus *fraud* keuangan.

Perkembangan Fraud di Indonesia

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada Tahun 2019 untuk yang kedua kalinya melakukan penelitian tentang *fraud* di Indonesia dalam tajuk Survei Fraud Indonesia (SFI). Hasil survei menunjukkan bahwa *fraud* tindak pidana korupsi adalah yang paling sering terjadi juga menimbulkan kerugian terbesar. Dampak kerugian *Fraud* dari korupsi antara Rp. 100 juta hingga Rp. 500 juta rupiah per kasus. Tindak korupsi rata-rata dapat terdeteksi secara cepat dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan (< 1 tahun). Dalam mendeteksi tindak korupsi ini, media berperan paling penting melalui kanal laporan pengaduan (ACFE Indonesia, 2019).

Dilihat dari usia pelaku *fraud*, paling banyak berada pada usia 36-45 tahun. Rata-rata pada usia ini, pelaku menduduki posisi sehingga memiliki kesempatan mengelola keuangan. Ironisnya pada urutan pertama pelaku *fraud* adalah lulusan sarjana sedangkan urutan kedua Magister. Dilihat dari masa kerja, *Fraud* dilakukan oleh karyawan dengan masa kerja 6 -10 tahun. Hasil survei juga mengatakan bahwa sebagian besar pelaku *fraud* tidak pernah di hukum. Temuan ini selaras dengan Survei Fraud Indonesia 2016 dan Report to The Nation 2018.

Berdasarkan hasil survei ACFE Indonesia Chapter Tahun 2019 bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi adalah korupsi dengan angka 64.4% dilakukan terhadap 239 responden, *fraud* penyalahgunaan aset/kekayaan negara 28.9%, sedangkan *fraud* Laporan Keuangan sebesar 6.7%.

Selanjutnya *fraud* yang paling merugikan Indonesia di tahun 2019 adalah korupsi, dengan total kasus 167 kasus dan jumlah kerugian 373.650 Juta . Urutan berikutnya penyalahgunaan aset/kekayaan negara & perusahaan atau sebesar 20.9% dengan 50 kasus dan total kerugian 257.520 Juta. Sedangkan urutan ketiga adalah *fraud* laporan keuangan atau sebesar 9.2%, dengan total 22 kasus dan jumlah kerugian 242.260 Juta.

Pelaku fraud berdasarkan jabatan pada urutan pertama adalah karyawan sebanyak 31,8 %, selanjutnya dilakukan oleh pemilik 29,4 %, urutan ketiga dilakukan oleh manajer 23,4%, dan selain dari tiga pelaku tersebut sebanyak 15,1%. Fraud dilakukan secara kolusif oleh 4 orang atau lebih. Sebagian besar pelaku fraud adalah laki-laki atau sebanyak 92,0% dan sisanya 8 % dilakukan oleh perempuan.

Para pelaku fraud memiliki masa kerja yang bervariasi, hasil survei ACFE Indonesia Chapter Tahun 2019 terhadap 239 kasus, 16 kasus pelakunya memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Sebanyak 51 kasus pelakunya memiliki masa kerja 1 sampai 5 tahun, selanjutnya dari 90 kasus pelaku memiliki masa kerja 6 sampai 10 tahun, dan dari 82 kasus pelakunya memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun

Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti diantaranya adalah penelitian Jonathan M. Karpof tahun 2020 berjudul “ *The future of financial fraud* ” yang mengatakan bahwa adanya *the impact of technological and wealth changes over time* meningkatkan kemungkinan *Fraud* yang terjadi pada masa yang akan datang. Perubahan teknologi dan perubahan perekonomian/kekayaan mampu merubah tatanan etika dan perilaku termasuk tindakan *fraud*. Namun dalam jangka Panjang adanya penyesuaian mampu mendorong pengurangan *fraud*.

Penelitian Georgios L. Vousinas Tahun 2019 berjudul “*Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model*”. Hasil temuannya mengatakan bahwa elemen utama ego memainkan peran penting dalam mendorong seseorang melakukan *fraud*. Peneliti juga mengembangkan teori dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan penipuan. Kemudian penulis merumuskan model baru yaitu *S.C.O.R.E. model (Stimulus, Capability, Opportunity, Rationalization, Ego)*.

Selanjutnya penelitian Hafith Ahabun Tahun 2016 yang berjudul “Makna *fraud* bagi pengelola keuangan daerah; kenikmatan dilematis (sebuah studi fenomenologi)”. Ahabun melakukan penelitian pada sebuah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menemukan bahwa para informan (SKPD) memaknai *fraud* sebagai sesuatu yang bukan anomaly, *fraud* diketahui dan dilakukan secara bersama-sama untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai dan instansi. Ironisnya hal ini menimbulkan dilematis bagi para informan karena disatu sisi menikmati disisi lain sadar bahwa tindakan itu tabu.

Dari beberapa referensi diatas peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yang dapat dikembangkan dan dijawab pada penelitian ini sekaligus menjadi pembeda dan kebaruan. Pertama tentang bagaimana perkembangan fraud masa kini seiring dengan canggihnya teknologi, kedua apakah Teori SCORE model dapat tergambar pada kasus *fraud* pada objek yang peneliti ambil, ketiga seringkali *fraud* terjadi pada lembaga/instansi yang memiliki anggaran besar apakah hal ini juga sama terjadi pada organisasi kecil bersifat sukarelawan dengan rata-rata tingkat pendidikan pengurusnya rendah. Secara ringkas beberapa pertanyaan tersebut dapat dirangkum menjadi tema bagaimana pengelola BKM memaknai *fraud*.

METODE PENELITIAN

Metode Fenomenology

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma interpretif. Pendekatan ini dipilih sebab lebih komprehensif dalam memperjelas makna *fraud*. Pencarian makna yang tersembunyi di antara tindakan sosial yang hendak dicapai oleh peneliti disejajarkan dengan paradigma interpretif, (Auliyana, 2017).

Dalam penelitian ini penulis sengaja menggunakan metode fenomenologi karena metode ini dianggap lebih komprehensif dan sesuai dengan kasus yang akan di jadikan objek. Menurut Creswell (2010) metode fenomenologi dilakukan oleh peneliti dalam mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Dalam memahami pengalaman-pengalaman hidup seseorang menjadikan para filsafat sebagai sebuah metode penelitian. Pada pendekatan ini peneliti mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relative lama demi dapat mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna.

Fenomenologi dipakai dalam penelitian ini karena memandang perilaku manusia (para pengelola BKM Wilayah Sukoharjo) sebagai pengalaman subjektif manusia beserta interpretasinya. Pandangan *fraud* dari berbagai informan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan dan pengelolaan BKM di Wilayah Sukoharjo menjadi data dasar dalam realita fenomenologi.

Penelitian ini menggunakan Metode Fenomenologi Transendental. Dalam penelitian fenomenologi transendental dari Husserl terdapat tiga alur kegiatan dalam analisis data diantaranya: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Kuswarno, 2009). Penelitian fenomenologi transendental merupakan studi mengenai penampakan dan fenomena yang di deskripsikan dengan kesadaran murni, tanpa melibatkan subjektifitas penulis, sehingga muncul makna nyata kehidupan. Penulis bermaksud mengungkap sisi benar dari makna *fraud* menurut masyarakat yang dipandang dari berbagai penjur, baik dari pengelola maupun pengamat Badan Keswadayaan Masyarakat.

Prosedur Pengumpulan Data

Teknik penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*, dimana data di peroleh langsung dari objek penelitian. Menurut Ahabun (2016), teknik penelitian triangulasi mendapatkan data langsung dari informan melalui wawancara dengan sumber data (informan), mengamati perilaku, dengan rujukan data sekunder berupa literatur dan sumber data penunjang seperti penyebaran kuesioner.

Dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terstruktur yang akan di ajukan ke informan, namun pada pelaksanaannya wawancara dapat mengalir saja dan tidak kaku. Wawancara dilakukan dengan flexibel baik waktu, tempat dan metode. Wawancara bisa dilakukan dengan mendatangi kediaman informan, dengan duduk santai di warung kopi, waktu istirahat disaat hari kerja, atau bahkan dilakukan dengan video call atau percakapan online. Hal ini dilakukan mengingat kesibukan informan yang bermacam-macam sehingga wawancara menyesuaikan informan. Selain metode wawancara dan pengamatan, peneliti melakukan cek data dengan menyebarkan kuesioner kepada pengelola BKM secara acak.

Dalam mendukung hasil penelitian, selain data jawaban informan dan pengamatan, peneliti juga menambahkan data berupa dokumen. Dokumen dalam hal ini adalah semua bentuk arsip tertulis yang berhubungan dengan peristiwa atau aktivitas tertentu yaitu aktivitas pengelolaan BKM dan bentuk *Fraud*.

Penentuan Lokasi, Informan Dan Pendekatan Informan

Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada alasan pengalaman peneliti saat melakukan aktivitas audit pada beberapa BKM yang berada di Wilayah Sukoharjo. Sejak diawalinya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Wilayah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2007 hingga saat ini, telah banyak dana yang di salurkan menghasilkan banyak perubahan dan kemajuan, namun tidak sedikit yang pada kenyataannya justru disalah gunakan serta dikelola dengan tidak baik. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Auditor BKM, Pendamping BKM, Pengurus BKM dan masyarakat. Dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dan kenyamanan informan, peneliti menggunakan nama samaran atau inisial. Hal ini wajib disampaikan oleh peneliti kepada informan diawal wawancara, sehingga ada kesepakatan antara peneliti dan informan. Peneliti juga menyampaikan tujuan dan maksud penelitian serta pentingnya penelitian ini, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran informan untuk memberikan informasi yang jujur dan relevan.

Teknik Analisis Data

Menurut Moleong teknik analisis data merupakan kegiatan memeriksa seluruh data dari berbagai instrumen penelitian, seperti dokumen, hasil tes, catatan, rekaman, dan lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar data lebih mudah dipahami sehingga bisa memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu teknik pengolahan data non numerik atau non angka, seperti hasil pengamatan dan hasil wawancara serta kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian kualitatif biasanya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan. Berikut adalah kerangka konseptual teknik analisis data pada penelitian ini :

1. Pada tahapan pertama, peneliti mengumpulkan data dari informan, baik dari internal pengelola BKM maupun perspektif informan dari luar pengelola BKM. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan pengamatan pada lingkup yang terbatas. Bentuk data yang dipakai adalah catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, wawancara, kuesioner dan lainnya. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar, atau angka baik hard file atau soft file. Selain itu untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan hasil jawaban informan dengan informan lain yaitu dengan mereduksi data kemudian mengolah menjadi data kuesioner dan disebar ke beberapa responden/pengelola BKM yang tersebar pada enam kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.
2. Dari data yang di peroleh, tahapan kedua adalah melakukan reduksi data yaitu menyiapkan, menajamkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi sesuai dengan kebutuhan penulis. Kemudian melakukan pemadatan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi utama serta fakta-fakta psikologis dari data yang terkumpul.
3. Tahapan ketiga adalah melakukan proses pengklasifikasian data dengan melakukan kategorisasi data, baik itu data observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.
4. Pada tahapan keempat adalah menemukan makna dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sesuatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru sesuai fenomena actual yang terjadi dilapangan dengan bantuan pengalaman peneliti masuk kedalam ranah penyimpulan. Kemudian menyajikan laporan penelitian yang berisi kutipan data untuk memberi gambaran lengkap proses dan hasil atau kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan dan Data

Proses penelitian ini cukup lumayan lama dimulai dari pengajuan proposal bulan Nopember 2020 hingga penyelesaian laporan pada bulan Mei 2023. Hal ini dikarenakan beberapa kondisi diantaranya ; kondisi pandemic yang melanda Wilayah Karasidenan Surakarta pada awal tahun 2020 hingga 2 tahun lamanya sehingga kebijakan *social dictancing* diterapkan cukup menghambat peneliti untuk melakukan wawancara, kemudian keterbatasan waktu dan ruang peneliti dan calon informan.

Data diperoleh dari wawancara eksklusif terhadap lima informan perwakilan yaitu perwakilan dari 2 orang koordinator BKM, 1 orang auditor, 1 orang Fasilitator, 1 orang pengurus UPK. Kemudian wawancara ringan terhadap perwakilan warga Sukoharjo sebanyak 4 orang. Serta data yang diperoleh dari responden perwakilan dari pengelola BKM yang ada di Sukoharjo sebanyak 19 orang mewakili BKM pada 6 Kecamatan. Data disimpan rapi dalam bentuk *Video recording*, *Voice recording*, dan Tabulasi kuesioner serta laporan keuangan beberapa BKM. Proses perolehan dan pengolahan data dilakukan sesuai dengan rencana penelitian pada bagian metode penelitian.

Selayang Pandang BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat adalah badan yang secara independent berdiri sendiri, dibentuk oleh kumpulan warga dengan satu orang koordinator ditunjuk melalui rapat akhir tahun. Badan Keswadayaan masyarakat selanjutnya di sebut sebagai “BKM”, mewakili masyarakat menjalankan fungsi sebagai penerima dan pengelola bantuan dari pemerintah maupun swasta untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

BKM melaksanakan tugas dan kegiatannya berdasarkan program dari dana yang mereka miliki, diantara sumber pendanaannya adalah :

1. Modal sendiri yang berasal dari dukungan atau swadaya masyarakat.
2. Dukungan dari pemerintah, diantaranya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)

3. Kerjasama dengan pihak ketiga baik swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, perbankan, dan lain-lain
4. Bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah
5. Bantuan dari donator
6. Kegiatan-kegiatan lain oleh unit pengelola yang sah.

(Sumber diambil dari AD/ART BKM, 2021).

BKM berjalan dibawah naungan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan beberapa program yang diluncurkan ; Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) dijalankan dalam Tiga tahap diawali pada Tahap I Tahun 1999 hingga Tahun 2003 kemudian di lanjutkan dengan P2KP Tahap II Tahun 2003 hingga Tahun 2008, dan P2KP Tahap III Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dimulai Tahun 2008 hingga Tahun 2016, serta Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang di mulai pada Tahun 2016 hingga saat ini.

***fraud* Pada BKM**

Dari empat informan warga sekitar BKM berdiri yaitu Pak Jat, Mas Iin, Mbok Ni, dan Pak Ban mengaku bahwa mereka tidak paham secara mendalam apa itu BKM dan bagaimana BKM berjalan, namun menurutnya selama ini mereka juga tidak pernah mendengar adanya tindak penyelewengan, atau kabar buruk tentang BKM di desanya. Meskipun demikian peneliti menelusur lebih dalam lagi dengan mengorek keterangan dari beberapa sumber yang kompeten yaitu dari para pelaku kegiatan atau pihak yang berkepentingan dengan BKM.

Benar saja bahwa pengakuan Informan Mas FR bahwa masih ada celah untuk melakukan permainan RR sehingga data RR terlihat bagus meskipun riil nya tidak. Memainkan RR adalah bentuk manipulasi data yang tentu saja tidak dibenarkan oleh program KOTAKU dan semua pihak. Dengan nilai RR yang terlihat bagus, BKM akan mendapat peluang untuk mendapat dana bantuan atau program lain. Seharusnya tidak layak menjadi layak karena adanya permainan RR. Return of Rate (RR) yaitu nilai tingkat pengembalian pinjaman pada ekonomi bergulir UPK BKM.

Hasil pengakuan informan mengisyaratkan bahwa celah *Fraud* pada BKM dimungkinkan ada dan terjadi. Tindak kecurangan terjadi tidak hanya pada instansi publik, lembaga pemerintahan, dan pihak swasta yang pada dasarnya memiliki pembagian kewajiban dan hak yang jelas dan profesional. Tindak kecurangan juga terjadi pada badan keswadayaan masyarakat, yang anggota-anggotanya adalah para sukarelawan perwakilan dari masyarakat, dengan kewajiban dan hak yang kurang begitu jelas atau minim apresiasi. Hal ini diperkuat dengan jawaban responden sebanyak lima orang atau 26 % mengakui bahwa pada BKM nya terdapat tindak kecurangan membuat laporan tidak sesuai kegiatan riil nya, dan 10 % menjawab terdapat penggunaan dana yang kurang jelas pada BKM nya.

Bentuk *fraud* Pada BKM

Hasil pengamatan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa *fraud* pada BKM dibagi menjadi 4 bentuk:

1. **Fraud Pengelolaan Keuangan BKM**
bentuk-bentuk *fraud* pada pengelolaan keuangan BKM adalah sebagai berikut :
 - a. Angsuran KSM yang tidak dicatat oleh pengelola UPK BKM dan digunakan untuk kepentingan pribadi
 - b. Adanya KSM fiktif dan hasil pencairan KSM digunakan untuk kepentingan pribadi
 - c. Manipulasi KSM Fiktif, pencairan Fiktif, Angsuran fiktif dengan tujuan meningkatkan nilai RR lebih bagus
 - d. Manipulasi RR agar terlihat bagus dengan mengubah tingkat kolektibilitas KSM atau menghapus KSM dengan tingkat kolek buruk
2. **Fraud Pengelolaan Kegiatan BKM**

fraud pada kegiatan BKM sangat minim terjadi, hal ini dimungkinkan karena sedikitnya kegiatan pada program KOTAKU, selain itu kondisi pandemic yang melanda dunia terkhusus di Indonesia berakibat pasifnya kegiatan BKM. Disamping kegiatan BKM yang jarang, beberapa kegiatan yang dikucurkan atas program KOTAKU memiliki anggaran dana yang kecil, dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan yang ketat.

3. *Fraud* Barang dan Jasa pada BKM

fraud pada pengadaan barang dan jasa BKM ditemui dalam bentuk :

- a. Mendapat potongan dari kesepakatan harga awal pembelian barang atau jasa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- b. Menaikkan harga pembelian barang/jasa (*mark up*) sehingga selisih harga digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dilakukan dengan meminta nota kosong

4. *Fraud* Kerjasama

Fraud pada kerjasama BKM hampir sulit ditemukan, dari beberapa kesimpulan wawancara indikasi *fraud* pada kerjasama terlihat hanya pada saat transaksi pengadaan barang atau jasa dengan pihak pemasok atau supplier. Pemasok demi mendapatkan tender pengadaan barang dan jasa rela untuk memberikan discount atau potongan harga kepada calon pembeli. Sehingga seringkali supplier berani mengeluarkan nota kosong atau nota tanpa pengurangan potongan harga. Tindakan ini dianggap wajar dan aman dilakukan, sehingga kedua belah pihak bak gayung bersambut, sepakat dan saling menguntungkan.

Faktor Pendorong *Fraud* Pada BKM

Peneliti menelusur lebih dalam mencari keterangan penyebab kecurangan terjadi, informan yang dapat di temui dan mengorek banyak keterangan yaitu informan Mas Fr, Mbak NA, Mbak TRS, Mbak NK, Pak JK, Mas Iin dan 19 responden anggota BKM di Sukoharjo.

Dari beberapa keterangan informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendorong *fraud* yang terjadi di lingkungan BKM adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu faktor pendorong terjadi nya *fraud* di lingkungan BKM adalah karena system pengendalian internal (SPI) yang kurang efektif. Kurang efektifnya SPI sebagian besar disebabkan oleh standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dijalankan oleh BKM. Sebagai contoh BKM sering mengabaikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan UPK, bahwa jumlah dana kas operasional UPK (*cash in hand*) maksimal sejumlah Rp.1.500.000,- dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) hari kerja dan disimpan dalam *cash box* terkunci; pengelola kas adalah sekretariat (secretariat bisa lebih dari 1 orang dan menyesuaikan kebutuhan dan kecukupan anggaran LKM/BKM); Semua transaksi kas wajib didukung dengan BKK, BKM atau BPB; BKM dan Sekretariat wajib melakukan kas opname secara berkala minimal 1 bulan sekali, namun hanya beberapa atau tidak semuanya mereka jalankan.
- b. Faktor pendorong *fraud* berikutnya adalah karena desakan kebutuhan ekonomi pelaku. Desakan kebutuhan ekonomi disebabkan karena beberapa hal ; suami tidak berkerja, PHK karena kondisi pandemic, anggota keluarga sakit, dan kebutuhan biaya sekolah.
- c. Faktor pendorong ketiga adalah karena karakter buruk personal pelaku *fraud*. Faktor ini menjadi kebiasaan buruk pelaku sehingga dimungkinkan dalam keadaan apapun, dimanapun kesempatan selalu diciptakan untuk melakukan *fraud*.

Bentuk Pengendalian *Fraud* Pada BKM

Beberapa kasus *fraud* yang terjadi di lingkungan BKM menjadi bahan koreksi untuk para pengelola BKM, sehingga para pengelola mampu menganalisis penyebab terjadinya *fraud*. Kemudian dari penyebab tersebut dapat di evaluasi kekurangan atau kelemahan SPI yang ada, berlanjut pada program pengendalian atau pencegahan *fraud*. Peneliti menelusur lebih dalam, apa yang telah dilakukan oleh pengelola BKM untuk mengendalikan tindak *fraud* terulang kembali .

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yaitu Mas Fr, Mbak NA, Mbak TRS, Mbak NK, Pak JK, Mas Iin dan 19 responden anggota BKM di Sukoharjo. Dari beberapa ulasan keterangan informan dapat disimpulkan bahwa bentuk pengendalian fraud pada lingkungan BKM adalah sebagai berikut :

- a. Pengendalian terhadap resiko kredit macet dilakukan dengan memilih anggota KSM yang mempunyai catatan raport bagus, tidak harus berjumlah banyak pada setiap KSM yang terpenting tertib.
- b. Memberikan syarat lebih ketat kepada anggota KSM yang mengajukan kredit, misal dengan melampirkan surat keterangan dari RT setempat dan surat rekomendasi dari kelurahan.
- c. Mengurangi jumlah nominal pencairan kredit dari plafon sebelumnya, jika KSM kurang tertib dalam angusurannya.
- d. Dalam kegiatan lingkungan misal pembangunan sarana publik harus melibatkan warga sekitar sehingga rasa kepedulian dan rasa memiliki muncul untuk pengendalian pelaksanaan pembangunan.
- e. Semua pihak sepakat bahwa untuk mengendalikan dan mencegah tindakan fraud, BKM harus memiliki SPI yang baik yaitu dengan melaksanakan seluruh petunjuk teknis dan prosedur yang telah di susun pada program KOTAKU.

Bentuk Penanganan *Fraud* Pada BKM

Tindakan *fraud* yang terjadi pada lingkungan BKM adalah bentuk fenomena kehidupan organisasi di masyarakat. Terlepas apakah tindakan *fraud* itu merugikan baik individu atau organisasi baik bernilai material atau tidak, tindakan *fraud* harus segera ditangani.

Dari beberapa pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa penanganan *fraud* oleh BKM didasarkan pada tingkatan kasus *fraud* yang terjadi.

- a. Pada tindakan *fraud* yang termasuk kasus ringan akan ditangani oleh internal BKM dengan cara kekeluargaan. Asas kekeluargaan di kedepankan mengingat pengurus BKM hanya lah sebatas sukarelawan, dengan minimnya apresiasi sehingga mencari penggantinya kesulitan.
- b. Sedangkan pada tindakan *fraud* pada kasus tingkat berat akan di serahkan pada pihak yang berwenang. Kasus tingkat berat yang dimaksud adalah kasus yang melibatkan banyak orang dan atau dengan kerugian yang ditimbulkan sangat material.

PEMAKNAAN FRAUD

1. *Punggowo Dadi Koco Benggolo*

Nilai Kearifan Budaya Jawa Punggowo Dadi Koco Benggolo

Akuntansi sebagai salah satu bidang ilmu selalu dikonstruksi dan dikembangkan secara sengaja untuk mencapai tujuan social tertentu. Realitasnya bahwa faktor-faktor lingkungan (sosial, budaya, ekonomi dan politik) seringkali mempengaruhi bentuk praktik akuntansi yang ada dan dijalankan dimasyarakat. Perkembangan faktor lingkungan ini membawa praktik akuntansi mengalami sejarah dan perkembangan yang unik (Zulfikar, 2008).

Pada praktik dan pengembangan struktur akuntansi pada wilayah Jawa, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan adat budaya Jawa. Nilai-nilai dan adat budaya seringkali dijadikan pedoman hidup sebagai landasan dasar manusia untuk saling berinteraksi dan mengembangkan sains. Nilai-nilai dan adat budaya ini sering di sebut sebagai Kearifan lokal (*local wisdom*) dalam beberapa kajian ilmu.

Menurut Sudarmin *et all.*, (2014) kearifan lokal (*local wisdom*) secara harfiah terdiri atas dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Local artinya adalah setempat atau wilayah terdekat, sedangkan *wisdom* artinya kebijaksanaan. *Local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai ide atau gagasan lokal yang bersifat bijaksana, bernilai baik, penuh kearifan, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh masyarakat. Kearifan lokal ialah gagasan konseptual yang menyatu dalam kehidupan masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus serta dapat berfungsi mengatur kehidupan masyarakat. Pada kajian antropologi, kearifan lokal dikenal sebagai *indigenous or local knowledge* (pengetahuan setempat), atau *local genius* (kecerdasan setempat), yang menjadi dasar *cultural identity* (identitas kebudayaan).

Dalam penelusuran ini peneliti menemukan ungkapan dari informan yang menurut peneliti merupakan *local wisdom* berupa pepatah Jawa. Kemudian peneliti mencoba menelusuri dengan mereduksi data dari berbagai sumber, sehingga berharap dapat ditarik kesimpulan makna dari ungkapan informan. Makna kalimat ini kemudian peneliti kaitkan dengan konsep akuntansi.

Menarik dari pengakuan salah satu informan Mas FR bahwa tindak kecurangan pada BKM itu bisa sebab pemimpin.

...punggowo kui dadi koco benggolo, pimpinan itu menjadi sebuah cermin mas.....

Pernyataan Mas FR menegaskan bahwa tindak kecurangan itu terjadi karena ada sebab contoh yang ditiru terutama dari pemimpin. Janji dan harapan yang disampaikan diawal tidak semanis kenyataan yang terjadi. Pemimpin lebih mementingkan kemakmuran keluarga ketimbang masyarakat, bahkan banyak yang dilakukan dengan hal yang tidak dibenarkan; korupsi, *fraud*, penipuan dll. Punggowo atau pemimpin itu menjadi *koco benggolo* (cerminan) dan panutan untuk masyarakat. Hanya saja menurutnya yang sering terungkap adalah kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang kecil (bawahan) karena “*backup*” yang kurang kuat.

Tentang ungkapan “*punggowo kui dadi koco benggolo, pimpinan itu menjadi sebuah cermin*” peneliti mencoba memberikan pertanyaan kepada empat informan wakil dari warga setempat, dan jawaban mereka setuju bahwa bahwa punggowo adalah pemimpin yang setiap gerak-gerik, tingkahlaku, dan karakternya menjadi cerminan dan panutan masyarakatnya. Mas iin menyampaikan :

“...ooo bisa bisa....setuju saya....setuju sekali, yang dilihat masyarakat kan pimpinan kan seperti apa, kalau pimpinannya bagus apa yang diomongin pimpinan pasti dituruti..”

Dalam pandangan Islam pemimpin di tegaskan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an Surah al-Fâthir (35) ayat 39:

Artinya : *“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*

Dalam ayat diatas bahwa Allah memberikan nasihat kepada Nabi Dawud untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi maka harus memberikan tauladan, kebijaksanaan dan perlakuan yang adil antar sesama manusia. Tidak di perbolehkan bertindak mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan orang lain dan diri sendiri. Karena sesungguhnya orang-orang yang termasuk sesat akan mendapat Azab dari Allah. Sehingga sudah jelas bahwa fitroh manusia adalah menjadi pemimpin diantara kaumnya dan makhluk lain.

Menurut Wahyuningsih (2020) kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seni berkomunikasi antar pribadi, atau pribadi dengan social untuk mencapai tujuan bersama. Keperibadian seorang pemimpin harus kuat, memiliki jiwa yang bertanggung jawab. Memiliki kekuatan fisik, rohani serta spiritual menjadi modal utama tercapainya tujuan mulia organisasi.

Dari beberapa ulasan diatas dapat di tarik benang merah bahwa ungkapan “*punggowo kui dadi koco benggolo*” adalah sebuah pepatah jawa yang masuk dalam kategori kearifan lokal, berarti kearifan setempat (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai ide gagasan lokal yang bijaksana, penuh kearifan, bernilai positif, tertanam dan diikuti oleh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hasil jawaban pembandingan dari kuesioner yang disebar dimana 95 % responden menjawab setuju bahwa “*punggowo kui dadi koco benggolo*” sebagai nilai kearifan lokal yang harus dijunjung tinggi.

Punggowo Dadi Koco Benggolo dalam konteks Akuntansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “*punggowo*” adalah gelar untuk seorang pengurus lokal tradisional, yang digunakan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam budaya Jawa punggawa adalah pejabat pengadilan dalam pewayangan. Sehingga dapat diartikan “*punggowo*” adalah seseorang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab memimpin, mengatur dan serta mengarahkan bawahannya dalam hal ini adalah masyarakat menuju derajat kemuliaan. Sedangkan “*kaca benggolo*” diartikan sebagai cermin besar. Dalam kisah Ramayana kaca benggala ini dimiliki oleh Rahwana, digunakan oleh putra Hanoman untuk memantulkan kembali sorotan mata mematikan anak Dasamuka, musuh dari Hanoman (Kuswartojo, 2019).

Peneliti menarik kesimpulan kurang lebih bahwa makna “ *Punggowo Dadi Koco Benggolo* “ adalah pemimpin akan menjadi suri tauladan bagi bawahannya dan masyarakat. Pemimpin memiliki kekuasaan mengambil keputusan dan kebijakan, sehingga harus berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku, karena akan diikuti oleh bawahan dan rakyatnya.

Pepatah ini sejalan dengan beberapa pituah dalam kitab Serat Rama Dan Asta Brata . Asta Brata berisi delapan ajaran utama tentang kepemimpinan. Delapan ajaran tersebut diambil dari sifat-sifat alam raya ; air (*Tirta*), Bumi (*Kisma*), Laut (*Baruna*) Bintang (*Kartika*), Matahari (*Surya/Palamarta*), Rembulan (*Candra*), Angin (*Maruta/Samirana*), dan Api (*Agni*). Dalam bait ke 14 :

“ *...Marmane wajibing rojo agawe tulada becik...*”

Pemimpin itu *Yekti Tiniru Sajagad Mungguh Ing Reh Ala Becik*, pemimpin adalah panutan bagi rakyatnya. Kelakuan baik dan buruk seorang pemimpin akan di tiru oleh rakyatnya. Kelakuan baik akan ditiru baik, kelakuan buruk akan di tiru buruk.

Dalam peribahasa sering disebut :

“ *guru kencing berdiri, murid kencing berlari* ”

keteladanan seorang guru akan di tiru oleh murid-muridnya. Jika yang diajarkan adalah hal keburukan maka murid bisa jadi meniru lebih buruk dari yang diajarkan. Jika yang diajarkan adalah kebaikan, murid juga akan meneladani kebaikan tersebut.

Dalam dunia Akuntansi keteladanan seorang pemimpin masuk dalam komponen Sistem Pengendalian Internal. Untuk dapat terus melangsungkan hidupnya, menjaga asset organisasi, memastikan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi, dan menjamin dipatuhinya kebijakan manajemen dibutuhkan Sistem Pengendalian Internal.

Sistem Pengendalian Internal menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)* memiliki lima komponen penting; lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*) pengawasan (*monitoring*). Komponen lingkungan pengendalian dapat membawa orang didalamnya sadar dan terkendali. Lingkungan pengendalian menjadi fondasi dari semua komponen pengendalian intern.

Dari ulasan diatas jelas bahwa pemimpin menjadi tauladan bagi bawahannya. Tindak kecurangan tidak akan terjadi manakala pemimpin senantiasa memberi contoh dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, menjaga komitmen integritas, menciptakan lingkungan dan budaya organisasi yang baik, memberi contoh kedisiplinan, bertanggungjawab terhadap tugas, dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Begitu sebaliknya jika pemimpin tidak mau tau tentang kondisi bawahan, menang sendiri, egois, tidak menghargai orang lain, tidak bijak dan semena-mena, maka kehancuran organisasi diujung tanduk, tindak penyelewengan kerap terjadi sebagai pelampiasan ketidakpuasan.

Ungkapan “*Punggowo dadi koco benggolo*” syarat akan makna kearifan lokal. Sama halnya jika kita merujuk kepada pesan Bapak Ki Hajar Dewantara: “*Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*” maka posisi kalimat pertama: “*ing ngarsa sung tuladha*” ini penting sekali. Sehingga jika kita kaitkan dengan konteks akuntansi bahwa nilai kearifan local hadir mempengaruhi praktik akuntansi yang berjalan pada adat Jawa. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Zulfikar (2008) bahwa konstruksi akuntansi yang bercorak Jawa muncul dari kearifan lokal.

2. Asal Main Cantik

Disampaikan bahwa jika permainan memanipulasi data RR dilakukan dengan cantik, maka hal itu tidak terlihat bahkan seringkali dapat menipu para pendamping BKM. Peneliti mencoba mengorek informasi tentang penyelewengan dengan pertanyaan “kalau kasus atau penyelewengan seperti itu biasanya terverifikasi ditingkat pendamping y mas...?”

..... jadi gini kalau terferifikasi atau tidak, tingkat kebocorannya pasti ada mas....tergantung dia mainnya cantik atau tidak cantik.....

Jika dalam permainan menyusun dan menyajikan laporan RR BKM di buat seindah mungkin, rapi, serasi, tidak menutup kemungkinan orang yang melihat akan tampak terpesona, meskipun berbeda

dengan realisasinya. Bahkan pihak pendamping seringkali terkelabui dengan laporan RR yang bagus. Faktor kesengajaan dalam manipulasi laporan keuangan menjadi terlihat baik, memiliki makna yang kurang baik dalam ungkapan “*asal main cantik*”. Untuk tujuan tertentu pelaku dengan sengaja mengesampingkan nilai kejujuran, nilai transparansi, dan akuntabel.

Dalam konteks kalimat dan ruang lingkup penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa makna “ asal main cantik ” memiliki konotasi negative. Ungkapan “ asal main cantik ” artinya bahwa permainan menyusun laporan keuangan dibuat secantik mungkin untuk mendapat penilaian bagus dari pengawas, sehingga lolos dari syarat mendapatkan bantuan program berikutnya.

Asal Main Cantik Dalam Konteks Akuntansi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 1 tentang (IAI, 2019) nomor satu bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah : dapat dipahami, relevan, memiliki keandalan, dan dapat dibandingkan, Kiasan “*Asal main cantik*” jika peneliti kaitkan dengan pernyataan standar keuangan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan andal, sangat bertentangan dan tidak sejalan.

Pada kiasan “*Asal main cantik*” tersirat penyajian laporan yang tidak jujur, tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Penyajian laporan RR tidak netral karena disajikan bukan tujuan untuk kebutuhan umum, melainkan untuk tujuan mendapat proyek sehingga disajikan sebgus mungkin meski informasi yang disajikan palsu. Hal ini sesuai dengan hasil jawaban responden yaitu sebanyak 84% menjawab tidak setuju bahwa permainan menyusun laporan keuangan dibuat secantik mungkin untuk mendapat penilaian bagus dari pengawas, sehingga lolos dari syarat mendapatkan bantuan program berikutnya. Menurut para pengelola BKM mereka benar-benar melakukan pembukuan sesuai prosedur yang telah di tetapkan oleh program KOTAKU.

Kiasan “*Asal main cantik*” bisa masuk sebagai tindakan *fraud* meskipun secara materiil tidak ada yang dirugikan. *Fraud* sengaja dilakukan untuk medapatkan keuntungan pelaku, terlepas apakah lingkungan sadar atau tidak sadar, menimbulkan kerugian materiil atau tidak. . Menurut Putri (2012) bahwa penyimpangan (*irregularities*) adalah penghapusan informasi dalam laporan keuangan secara sengaja, dan menyebabkan para pengambil kebijakan berubah keputusannya. Penyimpangan ini biasanya seringkali menyesatkan pemakai laporan keuangan. Kcurangan ini sering disebut sebagai *management fraud* (kecurangan manajemen).

Ungkapan “*asal main cantik* “ dimaknai sebagai tindakan yang disengaja untuk melakukan manipulasi laporan keuangan, dimana tindakan manipulasi ini merupakan tindakan *misrepresentations* yang tidak dibenarkan dan merugikan orang lain. Tindakan *fraud* ini terjadi karena karakter pada oknum yang telah terbiasa melakukan. Sehingga bisa dimaknai bahwa *fraud* sebagai sebuah karakter.

3. *Jenenge Wong Yo Doyan Duit*

Mbak NK salah satu informan sebagai mantan Auditor BKM menyampaikan pernyataan kepada peneliti :

...yo jenenge wong, yo doyan duit y mas...

(...ya namanya orang ya mas semua mau & butuh uang..)

Kalimat yang ringan disampaikan, dan sering terdengar ditelinga tetapi syarat akan makna. Informan seolah menyampaikan rasa pemaklumannya terhadap beberapa penyimpangan di BKM, sembari menunjukkan kerut wajah putus asa. Informan menyibak tabir gelap dalam pengelolaan keuangan BKM, mungkin karena seringkali menemui hal-hal yang dianggapnya tidak benar.

Hampir semua orang butuh uang untuk mencukupi kebutuhannya, jika melihat teori kebutuhan kita dapat mengupasnya dari para ahli seperti Maslow. Dalam teorinya "*holistic-dynamics, organismic theory*", Maslow (1970) berargumentasi bahwa sumber kekuatan dari perilaku manusia adalah kebutuhan, yaitu sesuatu dalam diri manusia yang mendesak untuk dipenuhi. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan-tingkatan yang membentuk sebuah hierarki berjenjang, yang pemenuhannya terjadi secara bertahap ; kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan social, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Dari beberapa uraian diatas, ungkapan “*jenenge wong yo doyan duit*” dapat disimpulkan bahwa setiap manusia pasti mau dan butuh uang, karena uang dapat digunakan untuk sarana mencukupi semua kebutuhan. Terlepas dari bagaimana cara mendapatkan uang, apakah dengan jalan yang benar atau tidak, uang dapat mengendalikan perilaku manusia. Sehingga seringkali manusia mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang, seperti korupsi, menipu, mencuri atau yang lainnya. Sehingga menurut peneliti makna tersirat dalam ungkapan “*jenenge wong yo doyan duit*” lebih condong berkonotasi negative. Ketika manusia dihadapkan pada godaan dan kesempatan mulus mendapat uang, manusia seringkali lalai, abai, dan tak terkendali perilakunya. Hal ini dijawab sama oleh informan warga sekitar Mas Iin “...*ya setuju sekali...bagi yang lemah finansialnya...*”, kemudian jawaban Pak Ban : “...*kebanyakan ngoten niku...*”.

Jenenge wong yo doyan duit Dalam Konteks Akuntansi

Berdasarkan Teori Keagenan menurut Micheal C. Jensen dalam buku Ghozali, (2020) terdapat hubungan antara pemberi wewenang (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Dalam perspektif perilaku dan struktur baik prinsipal maupun agen di asumsikan sebagai orang ekonomi rasional (*rational economic man*) yang hanya dimotivasi oleh kepentingan pribadi, meskipun mereka berbeda sehubungan dengan preferensi, kepercayaan dan informasi. Teori keagenan menyatakan bahwa agen akan berperilaku mementingkan kepentingan pribadinya sendiri (*self-interest*) yang mungkin akan bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

Pemberi wewenang (*principal*) dalam hal ini adalah pemerintah mendelegasikan pekerjaan kepada *agent* (pengelola BKM) dalam hubungannya bisa jadi timbul masalah yaitu masalah keagenan jika kepentingan keduanya tidak searah. Menurut Chrisman et al., (2004) masalah keagenan dapat muncul dalam bentuk *moral hazard* dan *adverse selection*.

Ungkapan “*Jenenge wong yo doyan duit*” dapat peneliti kaitkan dengan Teori Keagenan. Bahwa semua orang memiliki kebutuhannya masing-masing, sehingga ketika dihadapkan pada kesempatan menjadi agen (diberi wewenang), manusia cenderung bertindak untuk mementingkan kebutuhannya sendiri sehingga lalai akan tanggungjawab atau bahkan melakukan tindakan tidak dibenarkan (*fraud*).

Ketika manusia dihadapkan pada kesempatan menjadi agen (diberi wewenang) kemudian kebutuhan timbul tidak dibarengi dengan solusi, manusia cenderung dan terpaksa bertindak untuk memenuhi kebutuhan dengan segala cara. Sehingga muncul tindakan *moral hazard* seperti *Free-riding*, *shirking*, dan *perk-consumption*, dimana tindakan ini tidak dibenarkan karena lalai akan tanggungjawab dan termasuk tindakan penyelewengan (*fraud*). Termasuk dalam pengelolaan keuangan BKM adalah melakukan tindakan manipulasi data, pelaporan kolektibilitas (RR) palsu, penggelapan angsuran kredit, pencairan KSM fiktif, hingga pinjam tanpa angsuran.

SIMPULAN

Fraud adalah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berjamaah yang menyimpang dari prosedur, etika dan aturan, sehingga dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil orang lain atau organisasi yang di ikutinya. Beberapa bentuk fraud pada BKM diantaranya adalah fraud pengelolaan keuangan yaitu melakukan manipulasi catatan keuangan dan kolektibilitas/RR, penyelewengan pencairan kredit fiktif, dan pencurian angsuran KSM. Fraud pada kegiatan BKM hampir tidak pernah terjadi, hal ini karena sedikitnya kegiatan pada program KOTAKU, selain itu kondisi pandemic Covid 19 berakibat pasifnya kegiatan BKM, serta pada beberapa kegiatan yang diluncurkan atas program KOTAKU memiliki anggaran dana yang kecil, dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan yang ketat. Sedangkan fraud barang dan Jasa pada BKM adalah dengan melakukan persekongkolan potongan atau bonus dengan supplier, dan mark up harga. Fraud kerjasama pada BKM terjadi dalam bentuk pemenangan tender dengan iming-iming imbalan kepada oknum BKM.

Faktor pendorong fraud yang terjadi di lingkungan BKM diantaranya adalah karena pelaksanaan system pengendalian internal BKM yang lemah, adanya desakan kebutuhan individu dalam bahasa jawa muncul kiasan “*jenenge wong yo doyan duit*” , dan karakter buruk yang telah melekat pada pelaku. Pengendalian dan pencegahan tindakan fraud di BKM dilakukan dengan menjalankan prosedur dan SPI dengan baik, memperketat syarat pencairan kredit, mengurangi plafon kredit, dan selektif terhadap calon peminjam. Penanganan terhadap

kasus fraud di BKM didasarkan pada besar kecilnya kasus, pada kasus ringan ditangani dengan pendekatan kekeluargaan, sedangkan pada kasus fraud berat di serahkan pada pihak berwenang.

Peneliti menemukan ungkapan “Punggowo Dadi Koco Benggolo” yaitu bahwa pemimpin akan menjadi suri tauladan bagi bawahannya, sehingga harus berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku, karena akan diikuti oleh bawahan dan rakyatnya.

Fraud yang terjadi pada BKM dimaknai sebagai sebuah keterpaksaan dan sebuah karakter. Fraud terjadi sebagai sebuah keterpaksaan karena desakan ekonomi dan kondisi tidak ada jalan lain selain harus melakukan penyelewengan. Sedangkan fraud sebagai sebuah karakter yaitu bahwa tindakan fraud terjadi bukan karena kesempatan atau hal yang lain, fraud terjadi karena sebab utama karakter buruk pada oknum. Pada tempat dan kondisi apapun kesempatan akan selalu diciptakan untuk melakukan penyelewengan, sehingga sangat sulit untuk di sembuhkan atau dibrantas karena telah mandarah daging membentuk sebuah karakter dan budaya, dimana penyelewengan itu terjadi berulang dan tertata sehingga muncul kiasan “asal main cantik”.

SARAN

Penelitian ini bukan bermaksud untuk membongkar keburukan pengelola BKM yang ada di Kabupaten Sukoharjo, tetapi untuk mengetahui bagaimana pengelola BKM memaknai fraud yang terjadi pada lembaganya. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Beberapa saran yang dapat kami sampaikan untuk peneliti selanjutnya adalah memperluas informan dan teknik pengumpulan data, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pemaknaan fraud lebih luas dan lengkap. Sedangkan saran untuk para pengelola BKM adalah dengan mengembalikan niat awal mengelola BKM dengan melaksanakan pengelolaan sesuai prosedur.

Ringkasan jawaban responden dari harapannya kepada BKM kedepan adalah perlu ada peningkatan kapasitas dan pemahaman regulasi pada BKM dan jajarannya sehingga tidak akan terjadi kesalahan dan penyelewengan, jika hal itu masih tetap terjadi segera di tindak lanjuti dan diselesaikan dengan kekeluargaan terlebih dahulu. Dengan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat bahwa dana pinjaman di UPK itu dana simpan pinjam yg harus dikembalikan bukan dana hibah dari pemerintah, masalah kredit macet semoga segera terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustaf, A (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan. *Thesis*. Universitas Sebelas Maret.
- Ahabun, H. (2016). Makna *fraud* bagi pengelola keuangan daerah; kenikmatan dilematis (sebuah studi fenomenologi). *Tesis*. Universitas Brawijaya
- Albrecht. (2012). *fraud Examination* (04 ed.). Canada: South-Western, Cengage Learning
- Association of Certified *Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia. (2019). Survei *Fraud* Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76.
- Auliyana, E. (2017). Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit WTP Di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 4(1), 22–33. <https://doi.org/10.17977/um004v4i12017p022>
- Chrisman, J. ., Chua, J. ., & Litz, R. . (2004). *entrepreneursip theory and practice*. no title
- Christian Gleichmann, T. (2020). the Detection of *Fraudulent* Financial Statements Using Textual and Financial Data. In *Db-Thuringen.De*.
- Desviana, & et all. (2020). Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif *Fraud* Hexagon. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 50–73.
- Ghafur, A. (2017). Uang Dalam Perspektif. *Jurnal Iqtishodiyah*, III, 1–15.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* (Pertama). Semarang: Yoga Pratama.
- Ghozali I & Anis C. (2007). *Teori Akuntansi* (Edisi ke t). Semarang : Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2008). *No Title*. Raja Grafindo Persada.
- Hastjarjo, D., & et all. (2014). *Psikologi Masa Kini*. Yogyakarta: Beta
- heneke e. (2020). A Qualitative Case Study Of Chief Financial Officer (Cfo) Fraud Motivations Within

- Common And Uncommon Demographic Groups. by *Erich Heneke Randall Valentine*, PhD, Faculty Mentor and Chair *John Machnic*, PhD, Committee Member *Vanessa Wood*, EdD, Commi. March.
- Kusumastuti, A. dan Khoiron (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 148). <http://lib.unnes.ac.id/40372/1/>
- Kuswartojo, T. (2019). *Kaca Benggala : Perkembangan Habitat Manusia di Indonesia*. Jakarta: Ukara lawang Buana.
- Lestari, M. I., & Henny, D. (2019). Pengaruh *Fraud* Pentagon Terhadap *Fraudulent* Financial Statements Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i1.5274>
- Manossoh, H. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud* Pada Pemerintah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(1), 484–495.
- Manullang. (2005). No Title. In *Dasar-dasar Manajemen*. Jogjakarta: UGM University Press.
- Putri, A. (2012). Kajian : *Fraud* (Kecurangan) Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 03(01), 2.
- Rizka, F. R. (2017). No Title. *Reformasi Pelayanan Birokrasi Melalui Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5655/>
- Sari, S. P., & Safitri, L. A. (2019). No Title. Tinjauan Tentang Manajemen Laba Dengan *Fraud Triangle Theory* Pada Perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia., *SEGMENT, Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15(2), 19–33., 2684-8414.
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (B. Sarwiji (ed.); Edisi kedu). PT Indeks.
- Setiadi, E. (2000). Penegakan Hukum Pidana terhadap kasus-kasus korupsi dalam menciptakan clean government. *Mimbar*. 4, 305–333.
- Siallagan, H. (2016). *Buku Teori Akuntansi Edisi Pertama*. Surakarta LPPM UHN Press, 1, 285.
- Sudarmin, P., Si, M., & Pd, M. (2014). *Pendidikan karakter, etnosains dan kearifan lokal, konsep dan penerapannya dalam penelitian dan pembelajaran sains* (Parmin M.Pd (ed.); Pertama). CV.Swadaya Manunggal.
- Vousinas, G. (2018). Elaborating on the Theory of *Fraud*. New Theoretical Extensions. *SSRN Electronic Journal*, 1–17. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3163337>
- Vousinas, G. L. (2019a). Advancing theory of *fraud*: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Vousinas, G. L. (2019b). Advancing theory of *fraud*: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1). <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wahyuningsih, i. (2020). Model kepemimpinan pendidikan islam ibnu qayyim al-jauziyyah. *Thesis*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Watts;, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Wolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) ‘The *Fraud* Diamond : Considering the Four Elements of *Fraud*: Certified Public Accountant’, *The CPA Journal*, 74(12), pp. 38–42.
- Zulfikar. (2008). Menguak akuntabilitas dibalik tabir nilai kearifan budaya jawa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.7 No.02 (September), 144–150.
- <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/11/05/164705/kasus-korupsi-pnpm-mandiri-ketua-pnpm-upk-rendang-jadi-tersangka-baru>
- <https://sukoharjo.sorot.co/berita-1051-selewengkan-dana-nasabah-hingga-puluhan-juta-oknum-pegawai-bkm-deperkarakan.html>
- <http://kotaku.pu.go.id/view/2399/bkm-mandiri-untuk-keberlanjutan>
- <https://www.e-akuntansi.com/komponen-komponen-struktur-pengendalian-intern-spi/>
- <http://iwanmuljono.blogspot.com/2012/12/serat-rama-dan-asta-brata-4-wajibing.html>